

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Istilah strategi berasal dari (*strategy*) berasal dari “kata benda” dan “kata kerja” dalam bahasa Yunani. Sebagai kata benda, *strategos*, merupakan gabungan kata *stratos* (militer) dengan “*ago*” (memimpin). Sebagai kata kerja, *stratego* berarti merencanakan (*to plan*). Strategi merupakan konsep fundamental dalam berbagai bidang, baik itu dalam dunia bisnis, militer, pendidikan, hingga pemerintahan. Dalam konteks organisasi, strategi dapat dipahami sebagai suatu rencana jangka panjang yang disusun secara sistematis dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi bukan sekadar rencana tindakan, melainkan juga mencerminkan cara berpikir yang mencerminkan bagaimana sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep strategi menjadi penting agar pelaksanaan kebijakan dalam berbagai sektor dapat berjalan efektif dan efisien.

Seiring perkembangan zaman, konsep strategi terus mengalami evolusi, baik dari segi teori maupun praktik. Dalam dunia manajemen modern, strategi tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang statis, tetapi sebagai suatu proses dinamis yang harus terus dikaji, dievaluasi, dan disesuaikan dengan perubahan lingkungan eksternal. Globalisasi, perkembangan teknologi, serta kompleksitas permasalahan sosial-ekonomi menuntut setiap organisasi, termasuk institusi pemerintahan, untuk memiliki strategi yang adaptif dan responsif. Dengan strategi yang tepat, suatu entitas dapat tetap relevan dan kompetitif, bahkan dalam situasi yang penuh ketidakpastian.

Mintzberg dan Waters (1983) mengemukakan bahwa strategi adalah pola umum tentang keputusan atau tindakan (*strategies are realized as patterns in stream of decisions or action*). Hardy, Langley, dan Rose dalam Sudjana (1986)

mengemukakan *strategy is perceived as a plan or a set of explicit intention preceding and controlling action* (strategi dipahami sebagai rencana atau kehendak yang mendahului dan mengendalikan kegiatan). Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dikemukakan bahwa strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Tindakan mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan.

Menurut Alfred Chandler (1962), strategi adalah penetapan tujuan jangka panjang dan sasaran utama organisasi, diikuti dengan adopsi rangkaian tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Definisi ini menekankan pentingnya keterkaitan antara tujuan, tindakan, dan sumber daya. Chandler juga menegaskan bahwa struktur organisasi harus mengikuti strategi, bukan sebaliknya. Artinya, keberhasilan strategi sangat bergantung pada bagaimana organisasi mampu menyesuaikan struktur dan sistemnya untuk mendukung implementasi strategi secara efektif.

Michael Porter (1980), seorang tokoh terkemuka dalam bidang strategi bisnis, mengemukakan bahwa strategi adalah penciptaan posisi yang unik dan berharga, yang melibatkan serangkaian kegiatan yang berbeda dari pesaing. Porter memperkenalkan konsep keunggulan kompetitif yang terdiri dari dua pendekatan utama, yaitu *cost leadership* dan *differentiation*. Meskipun fokus utama Porter adalah pada sektor bisnis, konsep ini dapat diadaptasi ke sektor publik, termasuk pemerintahan, dengan menyesuaikan pendekatannya terhadap pelayanan publik, efisiensi birokrasi, dan kepuasan masyarakat.

Sementara itu, Mintzberg (1994) memperluas pemahaman tentang strategi dengan memperkenalkan lima definisi strategi yang dikenal sebagai "*5P for Strategy*": *Plan, Ploy, Pattern, Position, dan Perspective*. Strategi sebagai *Plan* berarti rencana terarah; sebagai *Ploy*, strategi adalah manuver untuk mengalahkan pesaing; sebagai *Pattern*, strategi adalah

konsistensi dalam perilaku; sebagai *Position*, strategi adalah cara organisasi menempatkan diri di pasar; dan sebagai *Perspective*, strategi merupakan pandangan dunia atau ideologi. Pendekatan Mintzberg ini menggambarkan bahwa strategi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tidak semata-mata sebagai dokumen perencanaan.

Strategi yang baik harus disusun berdasarkan analisis yang mendalam terhadap lingkungan internal dan eksternal. Pendekatan seperti SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) analysis, PESTEL (*Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal*) analysis, dan analisis stakeholder menjadi alat penting dalam penyusunan strategi yang realistis dan relevan. Kegagalan dalam mengenali faktor-faktor strategis ini dapat menyebabkan strategi yang disusun menjadi tidak efektif atau bahkan kontra-produktif. Oleh karena itu, kemampuan analitis dalam menyusun strategi harus dimiliki oleh setiap pengambil kebijakan, termasuk di lingkungan pemerintahan.

Dalam praktiknya, strategi tidak hanya disusun tetapi juga harus diimplementasikan dan dievaluasi secara berkala. Proses implementasi strategi mencakup pengorganisasian sumber daya, penugasan tanggung jawab, serta pengukuran kinerja. Tanpa implementasi yang konsisten dan evaluasi berkelanjutan, strategi akan menjadi dokumen yang tidak berguna. Banyak organisasi gagal bukan karena tidak memiliki strategi, tetapi karena tidak mampu menerapkannya dengan baik atau tidak melakukan penyesuaian ketika kondisi berubah. Ini memperlihatkan bahwa strategi merupakan proses berkelanjutan, bukan kegiatan sekali jadi.

Strategi juga memiliki dimensi komunikasi yang kuat. Strategi harus dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh pemangku kepentingan agar dapat dipahami dan diinternalisasi. Dalam konteks organisasi publik, hal ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, strategi dalam sektor publik memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif.

Partisipasi masyarakat dalam perumusan strategi pemerintah daerah, misalnya, akan menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan legitimasi kebijakan yang dihasilkan.

Peran pemimpin strategis dalam proses ini juga sangat penting. Pemimpin harus mampu menerjemahkan visi dan misi menjadi strategi yang konkret dan operasional. Kepemimpinan strategis menuntut kemampuan berpikir jangka panjang, mengelola perubahan, dan memotivasi seluruh elemen organisasi untuk bergerak menuju tujuan bersama. Di tingkat pemerintah daerah, kepala daerah dan pejabat struktural lainnya memiliki tanggung jawab strategis dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan publik yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayahnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan komponen vital dalam pengelolaan organisasi, termasuk dalam tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah daerah sebagai entitas publik yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat lokal, memerlukan strategi yang matang untuk menjawab tantangan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*). Strategi yang disusun harus mencerminkan visi pembangunan daerah, memanfaatkan potensi lokal, serta mampu merespons dinamika sosial-politik yang terjadi. Dengan strategi yang terarah, pemerintah daerah tidak hanya akan lebih efisien dalam penggunaan sumber daya, tetapi juga lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. Sedangkan Pemerintah Daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menurut Bagir Manan (2001:57) pemerintah daerah adalah satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah dalam daerah NKRI yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan bidang tertentu dibidang administrasi negara sebagai rumah tangganya. Pemerintah daerah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan memiliki hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan keuangan, kewenangan, pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan umum, dan sumber daya lainnya serta dilakukan secara adil dan selaras. Hubungan-hubungan ini akan menimbulkan hubungankewilayahan dan administrasi antar sesama pemerintahan. Hubungan administrasi ini adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara.

Sedangkan menurut HAW Widjajah (2013:7) Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemberian kewenangan otonomi kepala daerah yang terdiri dari daerah provinsi dan daerah kabupaten dan dan kota yaitu daerah provinsi diberikan kewenangan secara terbatas yang meliputi kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota.

Konsep pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada prinsip desentralisasi, yaitu pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah daerah terdiri dari pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota yang memiliki struktur tersendiri dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai secara luas sejak tahun 2001, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya, merancang kebijakan publik, serta menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak lagi berperan sebagai pelaksana kebijakan pusat semata, tetapi sebagai perumus dan pengelola pembangunan di tingkat lokal.

Pemerintah daerah merupakan entitas pemerintahan yang dibentuk berdasarkan prinsip desentralisasi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Dengan diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran pemerintah daerah semakin diperluas, terutama dalam hal penyusunan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki kewenangan untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga ekonomi. Dalam konteks inilah, keberadaan pemerintah daerah menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang salah satu indikator keberhasilannya dapat dilihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Otonomi daerah memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan potensi lokal dan mempercepat pembangunan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis masing-masing. Dengan kewenangan yang diberikan, daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan layanan dasar kepada masyarakat, termasuk layanan pendidikan,

kesehatan, dan ekonomi yang merupakan tiga pilar utama dalam pembangunan manusia. Dalam kerangka ini, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah seharusnya selaras dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Pemerintah daerah sebagai entitas otonom memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Dalam kerangka otonomi ini, bidang pendidikan menjadi salah satu fokus utama yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan manusia. Kewenangan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pendidikan dasar dan menengah merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah daerah sangat menentukan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui sektor pendidikan.

Indeks Pembangunan Manusia sendiri merupakan indikator penting yang menggambarkan kualitas hidup masyarakat dalam tiga dimensi utama: umur panjang dan sehat, pendidikan, serta standar hidup layak. Di antara ketiganya, pendidikan menjadi pondasi utama karena berdampak jangka panjang pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan *United Nations Development Programme (UNDP)* memberikan sebuah definisi bahwa pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi setiap jati diri manusia. Konsep pembangunan manusia tersebut pada dasarnya dapat mencakup sebuah dimensi pembangunan yang begitu luas.

Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan tersebut harusnya dapat dianalisis dan dipahami dari sudut pandang manusianya bukan hanya melihat dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dikutip dari UNDP (Human Development Report, 2008:103). *United Nations Development Programme (UNDP)* Menjabarkan komponen penghitungan pada Aspek pendidikan yaitu adalah sebagai berikut:

- a. Harapan Lama Sekolah – HLS (*Expectation Years Schooling – EYS*). Pendekatan sebelumnya menggunakan indeks angka melek huruf penduduk 15 tahun ke atas, diperbaiki menjadi indeks harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas. Angka HLS didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur- umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.
- b. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Pemerintah daerah dapat meningkatkan IPM bidang pendidikan melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan berkualitas, peningkatan kompetensi guru, serta penguatan kurikulum lokal yang kontekstual. Selain itu, kebijakan afirmatif seperti pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga

kurang mampu dan program wajib belajar 12 tahun juga menjadi instrumen penting dalam mendorong angka partisipasi sekolah. Pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang mendukung pembangunan manusia secara menyeluruh.

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan jika Pemerintah Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan dapat memajukan kesejahteraan kemakmuran masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang mana harus berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial perdamaian abadi (Asmani. Ma'mur, 2009:12). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengupayakan dan menyelenggarakan sebuah sistem pendidikan dalam upaya pembangunan sumber daya manusianya.

Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk dapat menyadari jika anak-anak bangsa saat ini adalah investasi masa depan bangsa dan negara yang harus mendapat pembinaan pendidikan. Karena merekalah yang akan kelak mengisi sebuah ruang proses dalam berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, wajar saja saat banyak orang yang menyerukan bahwa anak bangsa saat ini adalah bibit-bibit untuk masa depan bangsa, yang mana harus dapat diperhatikan dan dibina dengan baik pula. Merekalah wajah masa depan bangsa, tulang punggung negara serta terdapat harapan bangsa dan negara yang pada pundak mereka (Sabar Budi Raharjo, 2012:18).

Dalam praktiknya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam memastikan ketersediaan dan aksesibilitas layanan pendidikan yang inklusif bagi seluruh warganya. Ini mencakup pembangunan sekolah-sekolah baru di daerah terpencil, peningkatan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses belajar mengajar.

Pemerintah daerah juga dapat menggandeng sektor swasta dan masyarakat sipil untuk bersama-sama mengembangkan pendidikan melalui program kemitraan. Pendekatan kolaboratif ini penting untuk memperluas cakupan program pendidikan dan menciptakan sistem yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah daerah harus mengembangkan sistem pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap kinerja lembaga pendidikan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan berkala bagi tenaga pengajar, evaluasi kurikulum, serta penyusunan standar mutu pendidikan yang mengacu pada kebutuhan lokal dan nasional. Peran dinas pendidikan daerah sangat penting dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis serta melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten, pemerintah daerah dapat mendorong peningkatan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dua indikator utama dalam pengukuran IPM bidang pendidikan.

Dengan demikian, kewenangan otonom yang dimiliki pemerintah daerah bukan hanya sebatas hak administratif, melainkan juga menjadi tanggung jawab besar dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas. Peningkatan IPM bidang pendidikan merupakan tugas utama yang harus mendapat perhatian serius karena berdampak langsung terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, pemanfaatan anggaran pendidikan secara efisien, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah daerah dapat mewujudkan pendidikan yang merata, adil, dan bermutu. Ini merupakan langkah nyata dalam menjamin keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional.

Keterkaitan antara pemerintah daerah dan Indeks pembangunan manusia terlihat nyata dalam kebijakan-kebijakan daerah yang bersifat langsung maupun tidak langsung memengaruhi ketiga komponen Indeks Pembangunan Manusia. Misalnya, kebijakan alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan, pembangunan fasilitas publik, penyediaan layanan dasar, hingga program pemberdayaan ekonomi lokal akan berdampak langsung terhadap peningkatan nilai IPM. Daerah yang mampu menyusun perencanaan pembangunan berbasis data dan kebutuhan masyarakat akan lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup warganya. Oleh karena itu, peran strategis pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan IPM sebagai cerminan kualitas pembangunan yang berorientasi pada manusia.

Meski telah diberi kewenangan yang cukup luas, tidak semua pemerintah daerah menunjukkan kinerja yang optimal dalam meningkatkan IPM. Terdapat kesenjangan antara daerah satu dengan lainnya yang mencerminkan perbedaan dalam kapasitas fiskal, kualitas tata kelola, serta efektivitas implementasi kebijakan. Beberapa daerah berhasil mendorong percepatan pembangunan manusia melalui pendekatan inovatif dan partisipatif, sementara daerah lain masih tertinggal karena belum mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki. Kondisi ini menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap bagaimana konsep pemerintahan daerah dijalankan dalam praktik, terutama dalam kaitannya dengan pembangunan manusia sebagai inti dari pembangunan berkelanjutan.

Kabupaten Takalar, sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Selatan, telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan pembangunan manusia melalui sektor pendidikan, terutama di era kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Setiawan Aswad. Di bawah arahnya, pemerintah daerah memfokuskan berbagai kebijakan dan program strategis untuk memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada aspek pendidikan. IPM sebagai indikator pembangunan

tidak hanya mencerminkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menggambarkan efektivitas pemerintah dalam menyelenggarakan layanan dasar, termasuk pendidikan. Kesadaran akan hal ini mendorong Pemkab Takalar untuk merancang kebijakan yang inklusif dan berbasis data, sehingga strategi yang diambil dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan yang selama ini tertinggal dari akses pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Takalar menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di bidang pendidikan melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satu tonggak penting adalah lahirnya Peraturan Bupati Takalar Nomor 17 Tahun 2021 tentang Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun. Peraturan ini diterbitkan sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah mendapatkan akses pendidikan minimal hingga tingkat menengah atas. Di era kepemimpinan Pj. Bupati Setiawan Aswad, regulasi ini tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga diimplementasikan secara aktif dan terintegrasi dalam berbagai program pembangunan manusia berbasis pendidikan. Strategi ini dilandasi oleh kesadaran bahwa kualitas pendidikan menjadi salah satu indikator kunci dalam meningkatkan IPM Takalar secara berkelanjutan.

Seluruh penduduk Kabupaten Takalar berhak untuk memperoleh pendidikan layak dan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk selalu meningkatkan partisipasi sekolah dari masyarakat. Dengan makin banyaknya anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar maupun menengah diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar Tahun 2023, Persentase Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Masyarakat Kabupaten Takalar menunjukkan rendahnya partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan serta besarnya tantangan pemerintah dalam Upaya peningkatan partisipasi Pendidikan, misalnya masih tingginya angka Masyarakat yang tidak memiliki Ijazah sebesar 25,06 % yang

dikategorikan tidak sekolah dan putus sekolah, selain itu masih tingginya angka tidak melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi seperti SD/Sederajat 20,16%, SMP/Sederajat 19,59% dan SMA/Sederajat 25,91%. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Takalar perlu melakukan terebosan dalam rangka percepatan di bidang pendidikan. Peningkatan Partisipasi Sekolah dan Pembangunan fasilitas sekolah serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik harus menjadi prioritas dengan memperhatikan asas pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat di kabupaten Takalar.

Sedangkan pada perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bidang Pendidikan Kabupaten Takalar, dimensi pengetahuan merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah menghitung lamanya pendidikan yang ditempuh dari penduduk yang berusia 7 tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari penduduk usia 25 tahun ke atas. Selama kurun waktu 4 tahun, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Takalar mengalami peningkatan. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Takalar tahun 2023 sebesar 7,66 tahun. Dengan kata lain, penduduk di Kabupaten Takalar baru bisa bersekolah rata-rata sampai lulus SD.

Strategi pertama yang dijalankan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan bupati tersebut adalah Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun. Strategi ini menjadi pondasi utama dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah menetapkan bahwa seluruh perangkat daerah, tanpa terkecuali, harus menjadikan pendidikan sebagai prioritas lintas sektor. Ini artinya, sektor-sektor yang selama ini tidak secara langsung berkaitan dengan pendidikan seperti infrastruktur, sosial, dan pemberdayaan masyarakat juga diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Dengan menjadikan pendidikan sebagai urusan bersama, regulasi ini memperluas

jangkauan tanggung jawab pembangunan pendidikan kepada seluruh elemen birokrasi di tingkat daerah.

Dari sisi penganggaran, strategi ini diwujudkan melalui alokasi anggaran yang lebih berpihak pada pendidikan, baik formal maupun nonformal. Pemerintah Daerah Takalar secara aktif mengalokasikan dana untuk pembangunan pengembangan kualitas pendidikan di wilayah yang selama ini mengalami ketimpangan akses, terutama di daerah pesisir yang jauh dari pusat perkotaan. Selain itu, pemerintah menyediakan bantuan pendidikan untuk siswa dari keluarga kurang mampu guna mengurangi angka putus sekolah. Kegiatan pendidikan nonformal seperti pelatihan keterampilan, Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem pendidikan yang holistik dan mampu menjawab berbagai tantangan sosial yang menghambat partisipasi pendidikan.

Selanjutnya, strategi ini juga mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dalam mendukung program wajib belajar 12 tahun melalui pemanfaatan Dana Desa. Pemerintah daerah menganjurkan agar desa mengintegrasikan sektor pendidikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pendidikan anak-anak di komunitas mereka. Ini mencakup penyediaan sarana belajar, pemberian beasiswa lokal, hingga pembiayaan kegiatan literasi masyarakat. Sinergi lintas sektor dan tingkatan pemerintahan ini menjadi kekuatan utama dalam memastikan regulasi tidak hanya berhenti pada dokumen kebijakan, tetapi benar-benar terealisasi dalam kehidupan nyata masyarakat. Melalui pendekatan kolaboratif ini, Pemerintah Daerah Takalar menunjukkan komitmen kuat untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh warganya.

Strategi kedua adalah pendataan ATS berbasis Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM). Di bawah arahan Setiawan Aswad, Pemkab Takalar mengintegrasikan sistem SIPBM (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat) untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap

anak-anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan atau putus sekolah. Data ini menjadi fondasi utama dalam merancang intervensi terarah melalui program Kembali Bersekolah, termasuk pemberian beasiswa, pendampingan psikososial, hingga pembukaan jalur pendidikan alternatif seperti PKBM. Pemerintah juga melibatkan pemerintah desa, pendidik, dan tokoh masyarakat untuk menjadi agen perubahan dalam memastikan seluruh anak di desa-desa dapat menuntaskan pendidikan minimal 12 tahun.

Selain itu, adanya penguatan kemitraan dan peran aktif masyarakat dalam mendukung keberhasilan wajib belajar 12 tahun. Pemerintah daerah menggandeng perguruan tinggi, LSM, dan lembaga keagamaan untuk bersama-sama mendukung program literasi, pelatihan guru, dan kampanye pentingnya pendidikan. Di beberapa wilayah, kelompok-kelompok masyarakat lokal difasilitasi untuk membentuk forum peduli pendidikan, yang berperan mengadvokasi anak-anak yang rentan putus sekolah agar tetap berada di jalur pendidikan. Pendekatan ini menciptakan rasa kepemilikan masyarakat terhadap keberhasilan pendidikan di lingkungan mereka, sekaligus memperkuat budaya belajar sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat Takalar.

Melalui kedua strategi yang berlandaskan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tersebut, Kabupaten Takalar telah membangun fondasi kuat dalam peningkatan IPM bidang pendidikan. Kebijakan ini tidak hanya menargetkan peningkatan angka partisipasi sekolah semata, tetapi juga memperhatikan kualitas dan keberlanjutan pendidikan. Di era Setiawan Aswad, pendekatan pembangunan manusia benar-benar menyentuh dimensi struktural dan kultural masyarakat, menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dengan fondasi ini, Takalar berada di jalur yang tepat menuju kemajuan pembangunan manusia yang inklusif dan berkeadilan.

Berkat implementasi konsisten dari strategi yang tertuang dalam Perbup Nomor 17 Tahun 2021, Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) Kabupaten Takalar pada aspek pendidikan mengalami peningkatan yang signifikan. Indikator seperti Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan tren positif selama dua tahun terakhir. Bahkan, Takalar berhasil naik peringkat dari posisi ke-22 menjadi posisi ke-18 di antara seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dalam capaian IPM. Ini menjadi bukti bahwa regulasi yang kuat, dikombinasikan dengan pelaksanaan program yang tepat sasaran dan partisipatif, dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Strategi ini menegaskan bahwa kebijakan daerah yang berpihak pada pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Takalar pada bidang pendidikan mengalami peningkatan secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini tercermin dari membaiknya dua indikator utama IPM bidang pendidikan berdasarkan pendekatan *United Nations Development Programme* (UNDP) yaitu Harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata lama sekolah (RLS). Berikut perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bidang pendidikan Kabupaten Takalar:

KOMPONEN	2020	2021	2022	2023
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,41	12,42	12,48	12,49
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,29	7,49	7,64	7,66

Tabel 1.1 Perkembangan Harapan dan Rata-rata lama sekolah 2020-2023 Kab. Takalar (Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Takalar.)

Pada **Tabel 1.1** Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar mengenai perkembangan Harapan lama sekolah (HLS) kabupaten takalar pada tahun 2020 tercatat sebesar 12,41 tahun

dan meningkat menjadi 12,49 tahun pada tahun 2023 sehingga Penduduk Kabupaten Takalar yang berusia 7 tahun keatas di tahun 2023 memiliki peluang menikmati pendidikan selama 12,49 tahun atau setara SMA. Sementara itu, Rata-rata lama sekolah (RLS) yang mencerminkan tingkat pendidikan rata-rata penduduk usia dewasa juga menunjukkan kenaikan, dari 7,29 tahun pada 2020 menjadi 7,66 tahun pada tahun 2023, itu artinya penduduk Kabupaten Takalar usia 25 tahun keatas telah mengenyam pendidikan selama 7,66 tahun atau setara kelas 1 SMP.

Dengan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bidang Pendidikan tahun 2023 tersebut turut memberikan perubahan secara peringkat daerah terkait IPM di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2023 Kabupaten Takalar berhasil naik ke peringkat ke 18 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, sebelumnya kabupaten Takalar berada pada peringkat 22 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pendidikan Kabupaten Takalar mengalami Peningkatan selama 4 Tahun terakhir, tetapi pemerintah tetap harus berupaya lebih baik karena kondisi tersebut belum mampu menjadikan kabupaten Takalar menjadi salah satu daerah dengan IPM Pendidikan tertinggi dari 24 kota/kabupaten di Sulawesi Selatan. IPM Kabupaten Takalar pada tahun 2023 menduduki urutan ke 18 dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Takalar berdasarkan kriteria UNDP digolongkan sebagai IPM menengah.

Tentu hal ini harus menjadi prioritas perbaikan seluruh stakeholder Khususnya pemerintah daerah di kabupaten Takalar dengan Menyediakan program-program dalam peningkatan dan pemberdayaan kapasitas dan kompetensi tenaga pengajar di seluruh wilayah kabupaten takalar, selanjutnya pembaruan sarana dan prasarana pendidikan agar dapat mengejar ketertinggalan yang ada serta yang paling penting dalam pengalokasian dan pemberian anggaran pendidikan, pemerintah juga harus dapat mengatur penyaluran dana tersebut khusus

untuk wilayah yang membutuhkan karena ada banyak masalah baru yang muncul karena adanya ketidaksesuaian penggunaan anggaran Pendidikan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Takalar harus dapat memantau seluruh aktivitas dalam pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa permasalahan pendidikan yang terdapat di Kabupaten Takalar: Tingginya angka putus sekolah dan tidak sekolah, terbatasnya jumlah tenaga pengajar, apalagi daerah pesisir di kabupaten takalar, Sarana hingga prasarana yang belum memadai dan merata, Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, Kendala akses siswa menuju sekolah di beberapa wilayah Takalar masih sulit dijangkau.

Memahami akan pentingnya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) bidang pendidikan di Kabupaten Takalar, sehingga penulis memiliki keinginan untuk menganalisis lebih jauh terhadap Strategi pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia bidang pendidikan sehingga mengangkat judul Skripsi penelitian yaitu **“Strategi Pemerintah Daerah Dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bidang Pendidikan Di Kabupaten Takalar Tahun 2021-2023”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka masalah utama yang hadir pada penelitian ini ialah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bidang pendidikan dan melihat sejauh mana strategi Pemerintah daerah Kabupaten takalar dalam peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) Bidang Pendidikan. Berikut rumusan masalah dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bidang Pendidikan di Kabupaten Takalar tahun 2021-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bidang Pendidikan di Kabupaten Takalar tahun 2021-2023.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman terutama mengenai strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di kabupaten takalar tahun 2021-2023. Dengan demikian, hasil dari penelitian akan berkontribusi pada perkembangan disiplin ilmu pemerintahan khususnya dalam kajian Strategi Pemerintah

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada masyarakat, lembaga Pendidikan dan pemerintah dalam merancang strategi pembangunan pendidikan di daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi bagi pembaca maupun penelitian sehingga dapat menambah wawasan dan inovasi dalam mewujudkan daerah yang maju pada bidang Pendidikan.

3. Manfaat Metodologis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian-penelitian ilmiah lainnya yang memiliki fokus serupa, khususnya dalam hal studi kebijakan publik, indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Strategi pemerintah Daerah.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Konsep Strategi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang. Ditinjau dari asal usul katanya, Istilah strategi berasal dari kata Yunani yaitu

Strategia (*stratos* = militer dan *ag* = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi menjadi seorang jenderal . Strategi pada hakikatnya adalah sebuah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan.

Strategi merupakan suatu rencana menyeluruh yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Dalam konteks umum, strategi mencakup arah jangka panjang, pemilihan tindakan utama, dan alokasi sumber daya secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Konsep ini berasal dari dunia militer, tetapi kemudian diadopsi secara luas dalam bidang bisnis, manajemen, dan kebijakan publik. Strategi tidak hanya bersifat reaktif terhadap situasi yang ada, tetapi juga proaktif dalam merancang langkah-langkah ke depan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan internal dan eksternal. Dengan kata lain, strategi menekankan pentingnya perencanaan yang rasional, keputusan yang terintegrasi, dan upaya yang terkoordinasi dalam menghadapi ketidakpastian dan dinamika perubahan.

Strategi sebagai alat untuk mencapai tujuan, dalam perkembangannya, konsep mengenai strategi terus berkembang. Menurut Chandler (1962), strategi merupakan tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumberdaya yang penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun. Konsep-konsep strategi, di antaranya adalah :

- a) *Distinctive Competence* adalah tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Menurut Day & Wensley dalam Rangkuti (2013), identifikasi distinctive competent dalam suatu organisasi meliputi keahlian tenaga kerja dan kemampuan sumber daya.
- b) *Competitive Advantage* merupakan kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Menurut Porter dalam

Rangkuti (2013), ada tiga strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperoleh keunggulan bersaing, yaitu, cost leadership, diferensiasi, dan fokus

Dalam konteks pemerintahan, strategi memainkan peran krusial dalam merumuskan kebijakan publik dan menyusun rencana pembangunan jangka pendek, menengah, maupun panjang. Strategi pemerintah tidak hanya mencerminkan aspirasi nasional, tetapi juga menjadi instrumen untuk menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan politik secara terencana. Misalnya, strategi nasional dalam mengurangi kemiskinan atau memperkuat ketahanan pangan harus disusun dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal, kondisi sosial masyarakat, serta tren global yang sedang berlangsung. Melalui pendekatan strategis, pemerintah dapat mengintegrasikan berbagai sektor dan pemangku kepentingan dalam satu kerangka kerja yang harmonis dan terukur. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi dokumen formalitas, melainkan menjadi alat manajerial yang hidup dan dinamis untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

1.5.2 Konsep Pemerintah Daerah

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi provinsi dan kota masing - masing .

Setiap provinsi, kota, dan kabupaten mempunyai pemerintahan masing -masing yang diatur dengan undang - undang (pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945). Asas desentralisasi dalam mewujudkan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab merupakan dasar kewenangan bagi kabupaten dan kota dasar kewenangan kabupaten dan kota.

Pemerintah daerah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan memiliki hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan keuangan, kewenangan, pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan umum, dan sumber daya lainnya serta dilakukan secara adil dan selaras. Hubungan-hubungan ini akan menimbulkan hubungankewilayahan dan administrasi antar sesama pemerintahan. Hubungan administrasi ini adalah

hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara.

A. Fungsi Pemerintah Daerah

- a) Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b) Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

B. Tugas Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan utama pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Pemerintah Daerah terdiri atas pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang masing-masing dipimpin oleh Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, bersama dengan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat berdasarkan prinsip desentralisasi. Urusan ini terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a) Urusan Pemerintahan Wajib, yang harus diselenggarakan oleh seluruh daerah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Urusan ini terbagi lagi menjadi Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan yang lainnya.
- b) Urusan Pemerintahan Pilihan, yaitu urusan yang disesuaikan dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan masing-masing daerah. Contohnya meliputi: pertanian, perikanan, pariwisata dan yang lainnya.

Urusan-urusan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Selain itu, dalam melaksanakan urusan otonomi daerah, pemerintah daerah juga mempunyai tugas dalam hal penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembantuan, yaitu pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan tingkat yang lebih tinggi, namun didelegasikan kepada daerah. Dalam menjalankan tugas pembantuan ini, pemerintah pusat atau provinsi wajib menyediakan anggaran, sarana-prasarana, dan sumber daya lainnya. Contohnya termasuk pelaksanaan program nasional seperti pendataan sensus, pembangunan infrastruktur strategis yang berada di wilayah daerah tetapi memiliki kepentingan nasional.

Dengan demikian, secara umum, tugas pemerintahan daerah mencakup penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pelaksanaan tugas umum pemerintahan, dan pelaksanaan tugas pembantuan. Semua ini dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan kapasitasnya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal, serta memperkuat peran masyarakat dalam proses pembangunan daerah

1.5.3 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah sebuah pendekatan strategis yang digunakandalam manajemen untuk mengevaluasi kekuatan

(strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) yang dihadapi oleh suatu organisasi atau proyek. Pendekatan ini melibatkan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja atau tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Dengan menganalisis SWOT, organisasi dapat memahami posisi relatif mereka di pasar, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, serta merencanakan strategi yang sesuai untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman yang mungkin timbul. Analisis SWOT sering digunakan sebagai alat dalam pengambilan keputusan strategis untuk merumuskan rencana tindakan yang efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Berikut penjelasan SWOT:

- a) *Strength* (kekuatan) adalah kekuatan yang dapat diandalkan oleh lembaga. Dengan adanya kekuatan ini suatu lembaga dapat memahami dan mengetahui cara tepat dalam menyusun rencana global.
- b) *Weaknes* (Kelemahan) adalah keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki sebuah lembaga. Dengan mengetahui kelemahan, lembaga yang diharapkan dapat mengantisipasi agar kelemahan tersebut tidak menjadi penghalang dalam mencapai reencana global.
- c) *Oppertunity* (peluang) adalah situasi yang menguntungkan lembaga. Dengan mengetahui peluang lembaga diharapkan dapat memanfaatkannya menjadi potensi yang dapat mengantarkan tujuan utama.
- d) *Threath* (ancaman) adalah suatu keadaan yang tidak menguntungkan lembaga. Ancaman ini perlu diketahui lembaga dengan baik. Dengan mengetahui

Dalam menganalisis kebijakan pemerintah, penulis memerlukan pendekatan analisis strategis yang sistematis untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh pemerintah daerah bersifat efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan dalam analisis strategi adalah analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). Analisis ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal

pemerintah serta peluang dan ancaman eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih rasional dan berbasis data dalam menghadapi tantangan dan dinamika yang terus berkembang.

1.5.4 Matriks SWOT

Konsep Matriks SWOT merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk menyusun strategi berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal dan eksternal suatu organisasi, program, atau kebijakan. SWOT adalah akronim dari Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman). Matriks ini menyatukan keempat komponen tersebut dalam sebuah tabel yang memudahkan penyusunan strategi yang relevan dan kontekstual. Tujuan utama dari Matriks SWOT adalah menciptakan strategi yang mampu memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta secara bersamaan meminimalkan kelemahan dan mengantisipasi ancaman.

Dalam Matriks SWOT, faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah keunggulan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu institusi yang dapat mendorong pencapaian tujuan, seperti sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur yang memadai, sistem manajemen yang efektif, atau dukungan regulasi. Sementara kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam sistem internal, seperti kurangnya anggaran, lemahnya koordinasi antar unit, rendahnya kapasitas pelaksana, atau kurangnya komitmen politik. Kedua aspek ini harus dianalisis secara jujur dan objektif untuk menghasilkan strategi yang realistis.

Faktor eksternal mencakup peluang dan ancaman. Peluang adalah kondisi atau tren di luar organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong keberhasilan program, seperti perubahan kebijakan nasional yang searah, dukungan pendanaan dari luar, kemajuan teknologi, atau meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu pendidikan. Sebaliknya, ancaman

adalah tantangan dari luar yang dapat menghambat atau bahkan menggagalkan pelaksanaan strategi, seperti krisis ekonomi, perubahan politik, bencana alam, atau resistensi sosial. Identifikasi peluang dan ancaman ini penting agar organisasi mampu menyusun langkah antisipatif.

Matriks SWOT digunakan tidak hanya untuk pemetaan, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan empat jenis strategi: SO (Strengths–Opportunities), WO (Weaknesses–Opportunities), ST (Strengths–Threats), dan WT (Weaknesses–Threats). Strategi SO memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang, WO mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, ST menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, dan WT adalah strategi bertahan yang berusaha meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Dengan menyusun strategi berdasarkan keempat pendekatan ini, maka keputusan yang diambil menjadi lebih komprehensif dan tangguh terhadap perubahan lingkungan.

Secara keseluruhan, konsep Matriks SWOT merupakan alat analisis strategis yang sangat penting dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, terutama dalam konteks kebijakan publik seperti pendidikan. Dengan menggunakan matriks ini, pemerintah daerah atau organisasi dapat secara sistematis memahami posisi mereka dan mengembangkan strategi yang terukur dan adaptif. Dalam era ketidakpastian dan perubahan cepat, kemampuan untuk membaca kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara menyeluruh adalah kunci untuk menciptakan program yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat

1.5.5 Konsep Pendidikan

Pendidikan berasal dari bahasa Yunani “paedagogie” yang akar katanya “pais” yang berarti anak dan “again” yang artinya bimbingan. Jadi “paedagogie” berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris pendidikan diterjemahkan menjadi “Education”. Education berasal dari bahasa Yunani “educare” yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam

jiwa anak, untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Pengertian Pendidikan berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 tahun 2003 Bab I, pasal 1 menggariskan pengertian: "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pedoman bagi anak-anak dalam kehidupannya dimana pendidikan dapat menuntun seorang anak dalam memanfaatkan segala kekuatan kodrat dan potensi dari anak dimaksud yang pada akhirnya akan mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan yang maksimal baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat (Sugiarta, I. M., Mardana, I. B. P., Adiarta, A., & Artanayasa, W., 2019).

Oleh karena itu, pendidikan yang menjadikan manusia sebagai sasarannya tentunya memiliki banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya diartikan sebagai proses mewariskan nilai-nilai budaya antar generasi. Sedangkan pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi diartikan sebagai suatu usaha untuk membentuk kepribadian peserta didik melalui kegiatan yang sistematis dan komprehensif (Perwira, Y., Hasugian, P. M., & Marpaung, E. A., 2020).

Dari beberapa pengertian di atas maka esensi dari pendidikan itu adalah suatu proses interaksi manusiawi antara pendidikan dengan subjek didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses itu berlangsung dalam lingkungan tertentu dengan menggunakan bermacam-macam tindakan yang disebut alat Pendidikan.

1. Hakikat Pendidikan

Hakikat pendidikan tidak akan terlepas dari hakikat manusia, sebab urusan utama pendidikan adalah manusia

Wawasan yang dianut oleh pendidik dalam hal ini guru, tentang manusia akan mempengaruhi strategi atau metode yang digunakan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Disamping itu konsep pendidikan yang dianut saling berkaitan erat dengan hakikat pendidikan.

Pendidikan diartikan juga sebagai upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki idealisme nasional dan keunggulan profesional, serta kompetensi yang di manfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara. secara formal, menurut undang-undang sistem pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi perannya di masa yang akan datang. (UU No.20, 2003)

Pendidikan di berikan kepada semua warga negara atas dasar potensi dan kekuatan yang di milikinya dengan memperhatikann asas pemerataan dan keadilan secara sosial, ekonomis dan geografis. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat dalam setiap unit kehidupan dan di berikan dalam berbagai jalur, jenis, jenjang, dan satuan pendidikan. Pendidikan dikembangkan dan di kelola dalam suasana pedagogis-akademik oleh organisasi kelembangaan yang sehat, otonom, dan akuntabel, degan memanfaatkan evaluasi-diri sebagai aat manajemen berlandaskan baku mutu nasional dan internasional sebagai acuan penjaminan mutu internal dal eksternal. (Dikti, 1996).

Pada dasarnya pendidikan harus dilihat sebagai proses dan sekaligus sebagai tujuan. Asumsi dasar pendidikan tersebut memandang pendidikan sebagai kegiatan kehidupan dalam masyarakat untuk mencapai perwujudan manusia seutuhnya yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan sebagai kegiatan kehidupan dalam masyarakat mempunyai arti penting baik bagi individu maupun masyarakat. Sebab antara masyarakat dan individu saling berkaitan.

2. Tujuan Pendidikan

Secara umum, pendidikan bertujuan mengembangkan manusia agar memiliki kualitas pribadi terintegrasi, bermoral, dan berakhlak mulia, serta Mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki idealisme nasional dan keunggulan profesional, serta memiliki kompetensi bermakna untuk dimanfaatkan bagi kepentingan bangsa dan negara.

Selain itu, Tujuan Pendidikan Nasional dalam UUD 1945 Pasal 31, ayat 3 menyebutkan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.” Dan Pasal 31, ayat 5 menyebutkan, “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”

Pada UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang No. 20, Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami objek secara alami. Penelitian ini berfokus pada interpretasi, deskripsi, dan pemahaman mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan pengalaman manusia. Menurut Creswell, Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang berusaha untuk memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap fenomena yang diteliti, serta mengeksplorasi dan menggali pemahaman mendalam tentang konteks sosial dan budaya di mana fenomena tersebut terjadi.

Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data, yang dilakukan melalui triangulasi, yaitu gabungan antara observasi, wawancara, dan dokumentasi, data yang dikumpulkan berupa data kualitatif dan dianalisis secara induktif/deduktif sesuai dengan kebutuhan. Pada penelitian studi kasus melalui metode kualitatif, peneliti akan menelusuri sebuah atau beberapa kasus dalam jangka waktu yang telah ditentukan serta dijabarkan secara rinci mengenai pengumpulan data secara mendalam dari beberapa sumber, seperti observasi, wawancara, dokumentasi dan reportase. Kemudian hasil tersebut akan ditampilkan dalam bentuk deskriptif kasus (Creswell, Hanson, Clark Plana & Morales, 2007).

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Takalar, SMPN 1 Mangarabombang, SDN No 143 Inpress Topejawa sebagai bagian yang berkaitan dalam Pengembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2025 dengan estimasi waktu selama dua bulan. Penelitian ini akan melewati tahap persiapan (pengurusan administrasi dan keperluan penelitian) dan

tahapan pelaksanaan yang meliputi pengumpulan data, analisis data dan penulisan skripsi.

2.3 Informan Penelitian

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel yang berdasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai informan yang paling sesuai serta dapat dianggap bersifat representatif (Purba, 2023). Dalam hal ini, informan penelitian terdiri dari:

1. Kepala Dinas dan Kebudayaan Kabupaten Takalar.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Takalar.
3. Kepala Sekola, Guru/Tenaga Pengajar, Siswa(i) SMPN 1 Mangarabombang
4. Kepala Sekola, Guru/Tenaga Pengajar, Siswa(i) SDN No 143 Inpres Topejawa
5. Tokoh Pendidikan/Aktivist Pendidikan
6. Masyarakat Kabupaten Takalar

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2023). Untuk mendapatkan data yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode ilmiah yang melibatkan pemantauan dan pengamatan terhadap suatu objek atau fenomena dengan menggunakan indera manusia atau alat bantu. Observasi dapat dilakukan dengan memusatkan perhatian pada objek yang diamati dan mencatat apa yang terjadi sebagai dukungan dalam penelitian. Metode observasi dapat dilakukan dalam bentuk partisipan atau non-partisipan. Terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti dalam melakukan observasi yaitu Menentukan lokasi atau tempat di mana observasi akan dilakukan,

mengidentifikasi dengan jelas siapa atau apa yang akan diobservasi, Menentukan data yang diperlukan dan akan dikumpulkan selama observasi, mengatur cara pengumpulan data agar proses observasi berjalan dengan lancar, kesiapan alat-alat seperti buku catatan, kamera, atau memastikan peralatan lain yang mendukung kegiatan observasi untuk mencatat hasil observasi.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti (pewawancara) dan responden (yang diwawancarai). Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan detail tentang topik penelitian dari sudut pandang responden.

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data ketika seorang peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu diteliti, atau ketika peneliti ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan dan pengalaman responden. Metode pengumpulan data ini bergantung pada laporan atau penjelasan yang diberikan oleh individu tersebut mengenai diri mereka sendiri, atau setidaknya berdasarkan pengetahuan dan keyakinan pribadi mereka (Sugiyono, 2009:72).

Dalam wawancara penelitian ini, sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan namun tidak menutup kemungkinan akan muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti. Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan secara langsung dengan informan yang telah dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non-insani. Sumber ini mencakup berbagai dokumen, rekaman, berita, surat kabar, foto, dan catatan kasus. Dokumen merupakan catatan tentang peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental yang dihasilkan oleh seseorang. Contoh dokumen berbentuk tulisan termasuk catatan harian, riwayat hidup (life histories), cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen berbentuk gambar meliputi foto, gambar hidup, sketsa, dan sejenisnya. Sedangkan dokumen berbentuk karya seni misalnya lukisan, patung, film, dan lain sebagainya. Studi dokumen digunakan sebagai pelengkap dalam penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2009:83).

2.5. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel yang menjadi tujuan spesifik penelitian. Data primer tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data primer harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu individu yang dijadikan objek penelitian atau sebagai sumber untuk mendapatkan informasi atau data.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2023). Data sekunder ini bersifat mendukung kebutuhan data primer seperti buku, literatur, dan bacaan yang berkaitan dengan topik penelitian.

2.6. Fokus Penelitian

Agar dalam proses penelitian ini lebih terarah, terstruktur dan sistematis, maka ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama sebagai berikut:

1. Strategi pemerintah daerah dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bidang Pendidikan Kabupaten Takalar tahun 2021-2023

Penelitian ini juga berfokus pada strategi yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bidang Pendidikan Kabupaten Takalar. Strategi tersebut akan menggunakan pendekatan SWOT: *Strength* (kekuatan), *Weaknes* (Kelemahan), *Oppertunity* (peluang), *Threath* (ancaman).

2.7. Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (Noeng Muhadjir, 1998:104 dalam Rijali, 2018).

1. Data Pengumpulan (*Data Collection*)

Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data, setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa: (1) kata-kata dan (2) tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Moleong, 2000:112-113 dalam Rijali, 2018).

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas (Rijali, 2018).

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali. Membentuk pola yaitu peneliti mencari hubungan antara satu atau lebih kategori yang telah ditentukan.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-

mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) memikir ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang catatan lapangan, (3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Generalisasi naturalistik, yaitu peneliti harus mampu mengembangkan makna yang lebih umum dari kasus-kasus yang dipelajari.

2.8. Kerangka Pikir

